

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Senin

05 Februari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pemkot Baubau Persiapkan Penilaian Adipura 2024, Sejumlah Titik Pantau Segera Dibenahi



Plh Sekda Kota Baubau Muh Massad, SE, M.Si pimpin rapat persiapan lomba adipura 2024

Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kini tengah mempersiapkan diri untuk penilaian lomba adipura untuk yang KE lima tahun 2024. Dan pada Selasa (30/1/2024) telah diadakan rapat yang dipimpin Plh Sekda Kota Baubau Muh Massad, SE, M.Si didampingi Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si, Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si dan didampingi kepala OPD terkait, Camat dan lurah se Kota Baubau. Rapat tersebut untuk membahas pelaksanaan tindakan di lapangan terhadap lokasi yang menjadi titik penilaian pada lomba Adipura tahun 2024.

Pemkot dan Warga Baubau Sukses Tekan Inflasi



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Angka inflasi di Kota Baubau pernah mencapai angka tertinggi kedua se Indo-

nesia setelah Kota Tual. Bahkan dibarengi lagi dengan harga sangat tinggi, tidak stabil ekonomi dan di akhir tahun 2022 mencapai di angka 8 persen, di posisi angka nasional 2,5 persen. Di bulan September 2023 sejak perubahan kepe-

Lanjutkan ke Hal: 7

Tindak Lanjut Eksekusi Display Tenun Bone- Bone, Ibu Reffiani Rasman Kunjungi Limbo Tenun



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Ketua Dekranasda Kota Baubau Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, ST melakukan kunjungan ke Limbo Tenun Bone-Bone. Hal ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Display Tenun Bone-Bone 2024 yang diselenggarakan di

Atrium Lippo Plaza Baubau 26-28 Januari 2024. Menurut Lurah Bone-Bone Ramadan, kedatangan Ketua Dekranasda Kota Baubau di Limbo Tenun adalah untuk melihat secara langsung dan berdialog dengan penun Bone-Bone yang

Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Kadispora Baubau Dr Moh Tasdik Berharap Tumbuh Pemain Berbakat di Tournament Futsal Betoambari Cup I



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Turnamen Futsal Betoambari Cup Tahun 2024 yang

bertempat di Lapangan Futsal Galampa Rakia Kelurahan Katobengke Selasa (30/1/2024) resmi ditutup Kepala Di-

nas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Baubau Dr Moh Tasdik,

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Pemkot Baubau Persiapkan Penilaian Adipura 2024, Sejumlah Titik Pantau Segera Dibenahi

pelaksanaan tugas-tugas yang berat terutama untuk penilaian di pasar. Sementara yang harus di eksekusi adalah tiga pasar yaitu Pasar Wameo, Laelangi dan Karya Nugraha sehingga diharapkan hasilnya bisa maksimal.

Demikian pula dengan kebersihan disebagian ruas jalan agar lurah ikut berpartisipasi penuh meski saat ini masih berhadapan dengan Pemilu 2024. Di satu sisi, melaksanakan tugas pemerintahan di daerah dan di sisi lain juga ada Pilpres dan Pemilu. Sekarang tinggal bagaimana peran sebagai kepala

wilayah di tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk mengorganisir secara bersama. Dan untuk toko-toko yang masih menjadi masalah adalah di jalan Yos Sudarso dan RA Kartini karena ada tumpukan pasir. Ini harus menjadi perhatian lurah dibantu Satpol PP untuk diselesaikan secara cepat.

Sementara itu, soal pemukiman yang paling parah adalah BTN Palagimata karena banyaknya penumpukan gulma dan ini harus diantisipasi oleh Camat Betoambari untuk mengorganisir lurah menyelesaikan

persoalan ini. Sedangkan, untuk Pelabuhan agar Dinas Perhubungan mengorganisir kepentingan ini.

“Ada tiga saja yang sebenarnya direkomendasikan dalam lomba itu yakni bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana penguraian sampah, bagaimana melakukan pemilahan untuk menghasilkan industri kerajinan rumah tangga. Hanya keindahan dan estetika suatu daerah itu,” ujarnya.

Pada kesempatan rapat tersebut, sebelumnya Kadis Lingkungan Hidup Halfa membeberkan lokasi-lokasi mana saja yang

menjadi titik pantau dalam penilaian lomba adipura diantaranya Kawasan pasar, Pelabuhan, Kawasan pemukiman penduduk, kawasan perdagangan, termasuk ada beberapa kawasan sekolah dan OPD yang menjadi titik pantau.

Dan rencananya, mulai Rabu (31/1/2024) semua titik pantau dalam penilaian adipura 2024 sudah mulai dilakukan pembenahan oleh seluruh OPD, termasuk Camat dan Lurah dengan melibatkan RT dan RW di wilayahnya masing-masing. (*)

Pemkot dan Warga Baubau Sukses Tekan Inflasi

mimpinan di Kota Baubau, angka inflasi sudah di angka 5. Dan pada Desember 2023, angka inflasi sudah dapat ditekan pada angka 2,48 atau berada di bawah target nasional 2,5 persen.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat launching penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 sekaligus rapat koordinasi dengan seluruh aparat kelurahan se-Kecamatan Betoambari Kamis (1/2/2024) menunjukkan, penurunan inflasi sampai pada angka 2,4 dibawah target nasional tidak terlepas dari peran masyarakat dan Pemkot Baubau menjaga ketahanan pangan.

Hal ini perlu dilakukan, karena apabila itu tidak terkendali maka

daya beli masyarakat atau kemampuan membeli itu terbatas karena pendapatan tidak mungkin naik drastis. Kalau itu terjadi akan rawan pangan. Oleh karenanya, setelah ditekan selama 3 bulan dari menjadi angka 2,4 sehingga dengan demikian posisi ekonomi Kota Baubau saat ini sudah aman untuk inflasinya dan ini yang dipertahankan.

“Karena kita berbicara tentang pangan maka pangan yang harus kita jaga, apabila harga pangan naik tidak terkendali kita tidak akan mampu untuk membeli. Pada bulan September itu harga cabai sampai tembus 140.000/kg. Sementara yang dilurah hanya kisaran harga 50 ribu sampai 60 ribu per kg, Sementara itu ikan juga harganya selalu goyang terkadang

tinggi dan terkadang rendah. Mengapa hal itu terjadi karena coldstorage kita tidak berfungsi makanya itu yang harus tetap kita jaga di Kota Baubau dan yang paling mempengaruhi kita itu adalah beras karena kontribusinya sangat besar, makanya kita bersama Kepala Bulog, Kepala pos membantu kita untuk menjaga beras ini, karena apa bila itu sudah naik yang lainnya ikut berpengaruh,” ungkapnya.

Saat ini ungkap Dr Muh Rasman, Pemkot Baubau sudah mempersiapkan beras dan stoknya aman sehingga tidak perlu khawatir lagi sebab Pemkot Baubau sudah sejak jauh-jauh hari mengantisipasi terkait dengan stok beras ini.

“Jadi bapak dan ibu kalau ada yang bilang goyang harga beras

kita, ini tanggungjawab kadis perdagangan langsung ke Bulog. Jadi saya sampaikan ini agar kita bekerja keras untuk ini agar masyarakat kita dapat dan hari ini beras kita cukup dan ini adalah program nasional dan apa yang kita lakukan ini akan kita laporkan di nasional. Jadikan ini sebagai upaya untuk membangun kecerdasan silaturahmi kita. Jangan menjelang pemilu isunya kemana-mana dan pihak memihak akhirnya putus lagi silaturahmi dengan tetangga atau sepupu,” ungkapnya.

Launching penyaluran cadangan pangan pemerintah ini akan berlangsung setiap bulan dari Januari sampai Juni. Dan untuk Kecamatan Betoambari penerima beras bantuan ini berjumlah 1.107 KK. (*)

Tindak Lanjut Eksekusi Display Tenun Bone- Bone, Ibu Reffiani Rasman Kunjungi Limbo Tenun

sedang melakukan aktivitas menenun di kolong rumah, memberikan semangat besar kepada warga.

Ketua Dekranasda mengungkapkan Lurah Bone-Bone Ramadan mendorong agar Bone-Bone memiliki galeri yang untuk memasarkan hasil temuan asli penenun, terlebih daya tarik dari tenunan Bone-Bone ini bisa langsung melihat proses tenunnya, motif dan warna pun bisa menyesuaikan dengan keinginan.

“Saya challenge (menantang, red) penenun dengan memesan motif tenun malige, ikan dole dan bosara, yang bentuknya dideformasi menghasilkan

sehingga bentuk-bentuk sederhana namun jelas menggambarkan konsep sebenarnya, dan memotivasi penenun untuk berkolaborasi dengan Lurah.

Lurah Bone-Bone kan jebolan Seni Rupa Jogjakarta, tentunya mampu berkolaborasi untuk menciptakan motif-motif tenun yang nantinya menjadi ciri khas dan identitas tenun khas Bone-Bone, ungkap Lurah Bone-Bone mengutip pernyataan Ibu Reffiani Rasman.

Dalam kunjungan Ketua Dekranasda Kota Baubau Reffiani Rasman didampingi TP PKK Kelurahan Bone-Bone, menyempatkan untuk men-

gunjungi 4 kolong tenun yang terletak di Jalan Wawokia RT 01/RW 02 dan melakukan pembelian sarung langsung dari penenun.

“Tentu kami senang dan tambah bersemangat untuk mengkredit, karena pasar yang mulai terbuka untuk kami, sehingga kami bisa menjual langsung hasil tenunan, sesuai Arahan ibu Wali Kota untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tempat mengamankan karena Bone-Bone siap menerima tamu yang berkunjung ke Bone -Bone, ungkap penenun Hartati. (*)

Kadispora Baubau Dr Moh Tasdik Berharap Tumbuh Pemain Berbakat di Tournament Futsal Betoambari Cup I

SH, M.Si. Dalam arahnya, Tasdik berharap nantinya akan ada tumbuh pemain-pemain berbakat pada turnamen ini.

Disamping itu, sebagai salah satu cikal bakal mencari pemain futsal yang memiliki kualitas, baik dari segi teknik sehingga dapat menjadi budaya dan ajang pengembangan serta peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang olahraga.

Dr Moh Tasdik menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana Turnamen pihak-pihak terkait, seluruh panitia, wasit, maupun peserta yang sudah berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Tournament Futsal Betoambari CUP I Tahun 2024.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil menjadi juara

dan kepada peserta yang belum juara, jangan kecewa, terus berlatih, jadikan ini sebagai motivasi untuk dapat lebih berprestasi di lain waktu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia tournament Futsal Betoambari CUP 1, Helmi dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut bukan hanya untuk mencari juara akan tetapi juga sebagai ajang silaturahmi.

“Turnamen ini menjadi salah satu tempat atau wadah silaturahmi antar para pemain maupun peserta dan menjadi tempat menempa jiwa sportifitas serta solidaritas dalam diri para generasi muda Kota Baubau,” singkatnya.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Futsal Galampa Rakia Kelurahan Katobengke diikuti 31 tim futsal dan di partai final mempertemukan

antara Daeng Lala FC dan Wuraha FC, yang dimenangkan oleh Daeng Lala FC dan tampil sebagai juara 1 (satu). Wuraha FC sebagai juara 2 (dua), Wisata Tomia sebagai juara 3 (tiga) Acara ditutup dengan pemberian piala, uang pembinaan bagi para juara.

Turut hadir Ketua Umum KONI Sultra Alvian Taufan Putra, Ketua Askot PSSI Kota Baubau Asaad Adi Karim, kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau diwakili Kepala Puskesmas Katobengke Budi Utama, SKM, Danramil 1413-01/Wolio Mayor Arh Laode Mursali, Kapolsek Murhum Ipda Amrin Samiun, Camat Betoambari, Koordinator P3K Puskesmas Katobengke & Puskesmas Wajo serta tokoh masyarakat setempat. (*)

Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman : Sistem Musrenbang Perlu Diperbaiki

Pewartu: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat melakukan kunjungan kerja sekaligus tatap muka dengan seluruh ASN kelurahan se Kecamatan Batupoaro di kantor Lurah Nganganama Kamis (1/2/2024) mengungkapkan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkadang ada agenda sudah masuk prioritas usulan Kecamatan. Akan tetapi, setelah masuk di Kota itu hilang karena



pengambil keputusannya hanya memperjuangkan wilayahnya saja atau mungkin wilayah itu tidak pernah mendukung pen-

guasanya. Hal semacam itu perlu dikoreksi.

Karena itu, sebagai ASN murni dan bukan berasal dari par-

tai politik, pihaknya mempunyai kesempatan pada transisi ini sebab memang perintah dari pusat untuk melakukan perbaikan,

penyempurnaan apa yang dilakukan penjabat sebelumnya.

Selanjutnya kepala wilayah berkewajiban untuk memperjuangkan kepentingan wilayahnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini berharap setelah pertandingan, apa yang sudah disampaikan soal kebutuhan dipertemuan berikutnya seperti

apakah reses dewan atau jaring aspirasi atau Musrenbang, jangan sampai berubah lagi. Karena hal itu lah yang membuat sulitnya untuk menentukan prioritas mana yang perlu ditangani di suatu wilayah.

Pada Kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi meminta Camat dan Lurah agar

jangan baper kalau misal warganya menyampaikan uneg-unegnya dan hal itu dicatat dan dicarikan solusinya. Kemudian, mendengarkan masukan dan permintaan dari Camat Batupoara dan Lurah serta warga terkait dengan rehab kantor dan jalan serta pemasangan CCTV. (*)

Senin, 05 Februari 2024

Jokowi Beber Alasan Tunjuk Tito Jadi Plt Menko Polhukam



Presiden Joko Widodo membeber alasan menunjuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai plt menko polhukam.

Laporan: Hasim

JAKARTA--Presiden Joko Widodo membeber alasan menunjuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai plt menko polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur.

“Ya, Pak Tito (ditunjuk menjadi Plt Menko Polhukam) karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), kapolri, sekarang di mendagri. Saya kira untuk memegang di menko polhukam sudah enggak saya kira tidak ada masalah,” tuturnya di sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2). Meski begitu,

Jokowi mengaku sedang mempersiapkan sosok menko polhukam definitif.

Jokowi hanya tak ingin buru-buru mengumukannya. Sang Kepala Negara menegaskan yang terpenting adalah kestabilan kabinet.

“Ya, nanti dilihatlah (penunjukan menko polhukam definitif). Kita ini yang penting organisasinya berjalan dengan baik, yang paling penting itu,” tegas Jokowi.

“Ya, secepatnya (menyiapkan menko polhukam definitif). Gimana? Oh, dari non (non-parpol),” tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resign dari kabinet Jokowi

dan menyampaikan surat pengunduran diri langsung pada Kamis (1/2). Ia bertemu Jokowi sekitar 10 menit dan berbicara dari hati ke hati di Istana Negara.

Mahfud saat ini maju sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ia mengaku salah satu alasannya mengundurkan diri dari kursi menteri karena tak mau terlibat benturan kepentingan.

Untuk sementara, Jokowi mempercayakan Tito Karnavian mengisi posisi yang ditinggalkan Mahfud. Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024.(*)

Bupati dan Wakil Bupati Rohil Nyaris Adu Jotos di Pelantikan Pj Kades

Laporan: Hadi

JAKARTA--Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Rohil Sulaiman terlibat cekok dan nyaris adu jotos di acara pelantikan penjabat kepala desa (kades) di Rohil, Riau. Pelantikan pun ricuh.

Video cekok antara Bupati dan Wabup Rohil itu beredar luas di media sosial. Dalam video, terlihat keduanya cekok di acara pelantikan

Pj kepala desa atau penghulu. Pelantikan itu digelar di jalan lintas Pesisir Pedamaran, Rokan Hilir, sore tadi.

Keduanya tampak cekok mulut saat duduk bersebelahan. Tak lama kemudian, berdiri seorang wanita di sebelah kiri Bupati Afrizal Sintong yang diduga sang istri, yang kemudian memantik emosi keduanya.

Afrizal Sintong sontak mendorong Wabup Sulaiman yang duduk men-

genakan kemeja putih. Aksi dorong itu dibalas Sulaiman. Beruntung, aksi itu cepat dileraikan oleh tamu lain yang hadir.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Andrian Pramudianto membenarkan cekok Afrizal dan Sulaiman. Namun belum diketahui motif cekok keduanya.

“Benar. Namun persoalannya belum diketahui,” kata Andrian mengutip detikcom, Kamis (1/2).(*)

Terima Laporan Panwaslu Wolio, Satpol PP Langsung Tertibkan Bendera Parpol



Pol PP amankan bendera Parpol yang terpajang di Jembatan gantung Kota Baubau

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Baubau melakukan penertiban terhadap bendera Partai Politik (Parpol) yang dipasang di tempat terlarang Sabtu (3/2/2024).

Kasatpol PP Kota Baubau Drs La Ode Muh Takdir, M.Si mengungkapkan, sebelum melakukan penertiban terhadap bendera Parpol tersebut, pihaknya terlebih dahulu menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kecamatan

Wolio terkait dengan bendera Parpol yang dipasang di lokasi yang melanggar ketentuan.

Dan selanjutnya pada pukul 08.00 Wita, bersama Panwas Kecamatan Wolio, Satpol PP Kota Baubau langsung melakukan penertiban bendera Parpol

sesuai yang direkomendasikan Panwas di jembatan gantung, jembatan Beli dan depan Lippo Plaza Baubau.

Disamping melanggar, bendera Parpol dimaksud mengganggu keamanan lalu lintas sebab kemungkinan besar dapat membahay-

akan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor ataupun pejalan kaki yang akan melewati jalan tersebut.

Drs La Ode Muh Takdir mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak memasang APK dan bendera Parpol yang melanggar ketentuan. “Silahkan pasang APK dan bendera di tempat yang tidak dilarang oleh aturan,” terangnya. (*)

Bahlil Buka Suara soal Risma Tak Diajak Saat Jokowi Bagikan Bansos

Laporan: Listar

JAKARTA-- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak mempercayai apabila Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos), yang belakangan ini kerap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia lantas memperlakukan Risma untuk membuat acara bagi-bagi sembako sendiri, lantaran pembagian bansos masih menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

“Saya enggak percaya saya itu [tak dilibatkan]. Bila perlu Bu Risma bikin bagi-bagi juga sendiri kok. Tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembako. Itu tupok-sinya dia kok. DIPAnya DIPAnya dia di Kemensos,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2).



Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengatakan status menteri hanya sebagai pembantu presiden, sehingga para pembantu ini sudah harus bersiap jika nantinya diajak atau tak diajak oleh presiden dalam menjalankan program.

“Kalau misal kayak saya ngurus investasi, presiden bisa saja ajak saya, bisa juga tidak,” ujar Bahlil.

Bahlil tak mempersoalkan jika Risma menggelar acara terpisah dengan Presiden

Jokowi untuk bagi-bagi Bansos. Sebab, kementerian yang dipimpin Risma memiliki kewenangan dalam membagikan bansos. “Ya buat pangung lagi lah. Buat aja. Kewenangan dia kok. Kenapa sih kayaknya kita anak kecil aja. Santai aja,” ucapnya.

Bansos gencar disalurkan pemerintah-an Presiden Jokowi sejak awal tahun ini. Sejumlah pihak mempertanyakan ke-

napa Jokowi sendiri yang membagikan bansos di tengah waktu menjelang Pilpres 2024 yang digelar 14 Februari mendatang.

Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Bansos Beras; hingga Bantuan Ganti Rugi Petani. (*)

<https://www.baubaupost.com>

Senin, 05 Februari 2024

Sekda Sultra Asrun Lio Kukuhkan Dewan Pengurus Korpri Muba Barat



Pewartu: Mashuri

MUBAR - Seperti perkumpulan profesi lainnya, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diharapkan mampu menjadi wadah bertukar-pikiran bagi para anggotanya, sehingga bisa berinovasi, belajar hal baru dan lebih kritis, utamanya dalam menjawab permasalahan dihadapi serta bisa meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hal inilah yang menjadi salah satu pesan penting Sekda Provinsi Sultra yang juga sebagai Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD, usai mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Muna Barat masa bakti 2023-2028, Kemarin, di Laworo, yang diantaranya dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat juga selaku Penasihat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mubar, Sekretaris Daerah Mubar Selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mubar, hingga para Pimpinan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

"Kita perlu mencari cara agar bisa melayani masyarakat dengan makin cepat, makin baik, dan makin murah. Upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bersama-sama. Oleh karena itu, Korpri adalah perkumpulan para penyelenggara negara. Artinya, anggota Korpri harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi," pesan Sekda Sultra ini.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menerangkan, ada beberapa poin penting yang menjadi tujuan utama UU ASN. Pertama, bagaimana

meningkatkan indendensi dan netralitas aparatur. Kedua, meningkatkan integritas dan kesejahteraan aparatur. Dan ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengawasan dan akuntabilitas.

"Berangkat dari tujuan ini, maka organisasi Korpri merupakan wadah organisasi pegawai Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempersatukan serta menampung aspirasi segenap pegawai Republik Indonesia, utamanya dalam mengembangkan tugas pokoknya, baik sebagai abdi Negara, abdi Pemerintah, maupun abdi Masyarakat," tutur mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini.

Dia melanjutkan, berkaitan hal tersebut maka tahun ini, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2021-2026, sedang melakukan tahapan konsolidasi, pematangan dan penguatan organisasi. Oleh karena itu, penguatan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Muna Barat menjadi penting untuk dijadikan momentum konsolidasi, penataan dan penguatan organisasi bagi jajaran Korpri di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mantan Ketua Panwas Sultra ini mengatakan, dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, baru 6 Kabupaten yang telah dikukuhkan, yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari dan Kabupaten Buton. Termasuk sudah ada satu Kabupaten yang telah dibuatkan SK, yaitu Kabupaten Kolaka Timur, sehingga tinggal menunggu waktu penguatan Dewan Pengurus Korpri.

"Musyawarah Nasional KORPRI IX Tahun 2022 telah mengamalkan empat program utama KORPRI, yakni:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Menguatkan ideologi dan karakter ASN. Perlindungan karier dan bantuan hukum ASN. Dan peningkatan kesejahteraan ASN. Untuk itu, inilah yang akan menjadi salah satu semangat Korpri Sultra dalam berbuat dan berinovasi," tuturnya.

Selain itu, masih dia, Dewan Pengurus KORPRI Nasional juga memiliki berbagai program, antara lain Konsolidasi dan Peningkatan Organisasi di semua tingkat kepengurusan. Kemudian, Dialog Interaktif dalam bentuk Webinar dalam berbagai topik yang dilaksanakan secara rutin.

Mantan Kepala Sekretariat UHO Sultra ini melanjutkan, terdapat pula program lainnya, seperti Program KORPRI Mart, yakni berupa Pelaksanaan Hari Ulang Tahun KORPRI, yang dilaksanakan pada tanggal 29 November setiap tahunnya.

"Adapun Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat pada Tahun 2024 ini, diantaranya Mengadakan Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Sulawesi Tenggara, yang direncanakan pada Maret 2024. Selanjutnya, Mengadakan Sosialisasi LKBH, dan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada Juli 2024," terangnya.

Dalam kesempatan itu juga, Sekda Sultra tak lupa menitiplan

Distanak Sultra Terima Penghargaan Terbaik Kinerja Keuangan



Pewartu: Nandar

SULTRA, BP-Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (Distanak), Dr. La Ode Muhamaad Rusdin Jaya, S.IP., M.Si, berhasil menerima penghargaan sebagai kinerja keuangan terbaik

Mengatakan bahwa, "Prestasi ini merupakan pemicu bagi kita untuk terus bergerak dan hadir di tengah petani sebagaimana arahan Bapak Pj. Gubernur beserta Sekda, dan tentu saja dengan terus menggenjot pelaksanaan program dan kegiatan lain yang muaranya dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD kami"

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan terus bergerak dalam melakukan percepatan pelak-

Korpri Mubar kepada Pj Bupati Mubar selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Muna Barat, untuk senantiasa mendukung, baik dari sisi anggaran maupun ke-

sanaan program/kegiatan yang ber-sentuhan dengan masyarakat, khususnya petani.

Salah satu program tersebut adalah READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative) yang merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga di pedesaan, termasuk pemanfaatan sumber daya demi peningkatan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian.

Dalam Pelaksanaan program READSI di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masif dan efektif mendapat apresiasi dan atensi positif dari pemerintah pusat.

Penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov.

bijakan, agar KORPRI dapat betul-betul bermanfaat bagi para anggotanya.

"Kepada para pengurus yang baru dikukuhkan, saya ucapkan Selamat Bertugas,

Sultra berupa:

- Kategori kinerja keuangan terbaik dari 6 Provinsi dan 13 kabupaten penerima program READSI. Provinsi penerima program adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat

- Program READSI (Rural Empowerment Agricultural Development Scaling Up) yaitu program peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani miskin di pedesaan, termasuk pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian dan non pertanian.

Untuk diketahui, sasaran penerima manfaat Program READSI adalah Petani, dengan kriteria termasuk:

1. Petani miskin yang memiliki la-

han untuk kegiatan usaha tani da secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan ekonomi di sektor pertanian yang didukung oleh READSI;

2. Petani aktif yang akan bertindak sebagai "agen perubahan", yang mempunyai potensi untuk memotivasi petani lainnya dalam meningkatkan penghidupannya;

3. Petani yang tidak memiliki lahan dan petani pemilik lahan sempit yang potensial untuk mengembangkan sumberdayanya sebagai sumber pendapatan keluarga;

4. Kepala keluarga perempuan yang aka difasilitasi oleh program dalam upaya pengembangan usaha tani lahan pekarangan, nonfarm, perbaikan gizi, dan pengelolaan keuangan. Tutupnya(*)

membimbing, melindungi dan melimpahkan taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam upaya meningkatkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara tercinta," harapnya. (*)

Ketua DWP Buton Ny Kiki Amalia Asnawi Lakukan Sosialisasi E Reporting



Pewartara: Rahman

BUTON, BP-Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton melakukan sosialisasi E Reporting untuk melaporkan kegiatan istri PNS tersebut. Sosialisasi tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi DWP Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Jumat, 2 Februari 2024

Rakor dan sosialisasi dipimpin langsung Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia Asnawi yang dihadiri Ketua DWP OPD Lingkup Pemkab Buton

Untuk melaporkan kekuatan DWP di OPD telah menggunakan E-Reporting dan kita mengenal

ini sejak tahun 2016. Penggunaannya sudah berjalan baik baik di daerah maupun pusat," kata Ketua DWP Buton.

Dikatakannya, di tahun 2024 ini seiring perkembangan teknologi diharapkan setiap kegiatan dilaporkan oleh admin DWP OPD dalam kegiatan sudah menggunakan E-Reporting baik menginput, maupun pengiriman data sebagai laporan ke tingkat pusat.

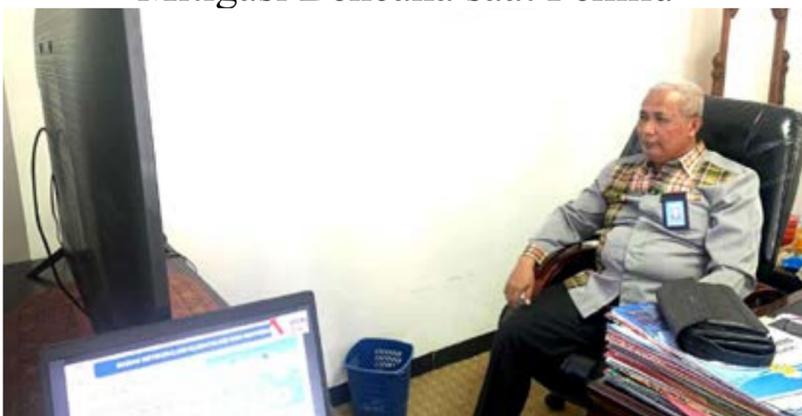
"Perlu kita ketahui pada pelaporan di tahun ini, setiap kegiatan yang akan dilaporkan itu ditekankan kepada kualitas pelaporan dimana satu kegiatan satu laporan dan berhubungan dengan kegiatan DWP yang meliputi kegiatan

bidang pendidikan, ekonomi sosial budaya yang mengacu pada visi dan Misi DWP," katanya.

Pelaporan kegiatan E-Reporting mengacu pada formula atau rumusan 4 W + 1 P yaitu D ; adalah data what (Apa), Who (siapa) When (kapan) Where (Dimana) dan P mempunyai arti kegiatan bersifat publik bukan pribadi atau kelompok tertentu.

Ketua DWP Buton juga mengajak anggotanya bersatu padu membangun DWP yg mandiri dan mampu bersaing dalam pembangunan global untuk mencapai tujuan bersama menciptakan kesejahteraan keluarga seutuhnya dan pembangunan Buton seluruhnya. (*)

Sekda Buton Ikuti Rakor bersama BMKG Mitigasi Bencana saat Pemilu



Pewartara: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor dalam rangka memitigasi potensi bencana

saat Pemilu serentak 2024 secara daring di Ruang Kerjanya, pada Kamis siang, 1 Februari 2024.

Rakor yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Bu-

dhi Reviyanto, S.I.K., M.H. itu dihadiri secara daring oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati dan jajaran BMKG.

Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk mengeta-

Pemkab Buton Tengah Gelar FKP Ranwal RKPD 2025



Laporan : Ardi

BUTENG, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2025, di gedung kesenian lakudo, Kamis (1/2/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan, forum konsultasi ini merupakan media penyatuan komitmen yang tinggi untuk seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

"Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menghimpun apresiasi

para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2025, dalam kerangka mewujudkan visi Kabupaten Buton Tengah yaitu "terwujudnya visi Kabupaten Buton Tengah sebagai pusat pengembangan agribisnis yang berlandaskan iman dan taqwa", ungkapnya.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan tema RKPD tahun 2024 yang diamanatkan dalam arah kebijakan RPD tahun 2023-2026 yaitu "Peningkatan perekonomian yang unggul berlandaskan iman dan taqwa".

Pj Bupati menuturkan, melalui konsultasi publik RKPD ini, ada beberapa hal yang saya tekankan untuk menjadi perhatian bersama yaitu: Pertama, Tahun

2024 kita akan melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Kedua, Program kegiatan tahun 2025 harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan PAD, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mampu mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing investasi.

Ketiga, Pembangunan Kabupaten Buton Tengah harus segera didorong dan difasilitasi untuk di realisasikan momentum terbangunnya kawasan perkantoran Labungkari adalah bagian dari perwujudan program prioritas Kabupaten Buton Tengah. Kuantitas dan kualitas SDM sesuai kebutuhan

tenaga kerja menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan, sehingga mendapatkan manfaat yang besar bagi daerah.

Ke Empat, Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, saya mengajak para pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RKPD tahun 2025 ini kata Pj Bupati, akan kita fokuskan pada pemenuhan target kinerja kegiatan yang terkait dengan prioritas daerah serta memberikan daya ungkit sehingga berdampak langsung bagi masyarakat Buton Tengah.

"Saya berharap, konsultasi publik ini benar-benar menjadi wadah untuk menjangkau aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal dokumen RKPD tahun 2025, sehingga dapat di implementasikan dengan baik", pungkasnya. (*)

hui potensi bencana di Provinsi Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, lancar, dan kondusif di Provinsi Sultra.

"Tiga belas hari lagi kita akan melak-

sanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak," ungkapnya.

Kepala BMKG

menjelaskan bahwa prakiraan cuaca di Sultra untuk bulan Februari 2024 beberapa daerah mengalami curah hujan di atas normal. Hal tersebut diambil berdasarkan pantauan citra satelit BMKG.

"Tentunya Pemprov Sultra harus menyiapkan skema terburuk apabila hal di atas terjadi. Apalagi berkaitan dengan distribusi logistik pemilu ke berbagai wilayah di Sultra," jelasnya. (*)

Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bisa Digunakan Sampai Masa Berlaku Habis

Laporan: Warman

JAKARTA, BP-Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dapat digunakan sampai masa berlakunya habis. Aturan ini tertuang dalam ketentuan peralihan pasal 449 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"SIP yang saat ini ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sehingga tetap ada legalitas praktiknya walaupun STR sudah diubah menjadi seumur hidup," ungkap juru bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, Kamis (01/02/2024).

STR atau Surat Tanda Registrasi meru-

pakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Awalnya, STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun. Namun, UU Kesehatan yang baru mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup.

Sementara, SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan peralihan pada pasal 449 menyebutkan bahwa STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP tersebut.

Sementara itu, STR dan SIP yang telah selesai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diterbitkan dan dinyatakan berlaku hingga masa berlakunya habis.

"Jadi meskipun STR sudah berlaku seumur hidup, tidak perlu langsung memperbaharui SIP, kecuali masa berlakunya sudah berakhir," tegas dr. Syahril. (*)

Kemenkes Bangun RS untuk Pemerataan Akses Kesehatan di Daerah



Laporan: Yeti

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah merevitalisasi layanan primer berupa pengaktifan 300.000 posyandu dan melengkapi fasilitas puskesmas untuk mencegah masyarakat sehat jatuh sakit. Tidak hanya itu, Kemenkes membangun 4 rumah sakit baru yang akan menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap, khususnya untuk menangani kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau ginjal (KJSU), di 4 provinsi.

Empat rumah sakit baru itu, yakni RS UPT Vertikal Surabaya, Jawa Timur; RS UPT Vertikal Makassar, Sulawesi Selatan; RSV Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur; dan RSV Jayapura, Papua.

"Kemenkes berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Mepid (1/2/2024).

Empat rumah sakit vertikal (RSV) tersebut mulai dibangun pada 2023 dan ditargetkan rampung tahun ini. Misalnya, RSV di IKN mulai dibangun pada 20 Desember 2023 serta ditargetkan

selesai pada Juli 2024, sedangkan RSV di Jayapura mulai dibangun pada 3 September 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.

Sementara itu, RSV Surabaya dan Makassar juga ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Kedua RSV itu direncanakan menjadi rumah sakit superhub pusat layanan rujukan akhir untuk wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

RS UPT Vertikal Surabaya didesain untuk dapat memberikan layanan komprehensif, khususnya untuk penyakit katastrofik, secara paripurna mulai dari diagnostik, terapeutik, hingga rehabilitatif. Rumah sakit UPT vertikal

juga bertujuan untuk bersaing dengan rumah sakit lain di Asia.

Tahun lalu, Kemenkes juga sudah mengoperasikan RSV baru, RSUP dr. Ben Mboi, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengoperasian RSV ini agar pasien kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU) mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah yang membuat keluarga pasien harus mengeluarkan biaya tinggi.

Selain membangun rumah sakit baru, Kemenkes juga membangun infrastruktur tambahan untuk melayani ibu dan anak pada 6 RSV di 5 provinsi. Pembangunan infrastruktur tambahan itu dengan cara melakukan ekspansi infrastruktur di 6 RSV mi-

lik Kemenkes di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Makassar.

Enam rumah sakit tersebut, yakni Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Rumah Sakit Persahabatan Provinsi DKI Jakarta; Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin di Bandung, Provinsi Jawa Barat; RSUP Dr. Sardjito di Provinsi DI Yogyakarta; RSUP Prof.I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar, Provinsi Bali; dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan terbaru tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini.

"Keberadaan rumah sakit Kemenkes akan memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan yang sudah ada, dan juga akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan yang melaksanakan fungsi edukasi, pusat penelitian, dan pengembangan kesehatan," tutup dr. Nadia. (*)

Skrining Kanker Serviks Modal Utama Tanggulangi Kematian Perempuan

Laporan: Andina L

JAKARTA, BP-Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia adalah dengan skrining sedini mungkin.

"Salah satu penyebab kematian tertinggi untuk kanker wanita di Indonesia adalah kanker serviks. Skrining kanker serviks sebagai salah satu modalitas utama untuk menanggulangi tingginya angka kematian kanker serviks di Indonesia," ujar Prof. Dante dalam diskusi tentang kanker serviks, Jumat (2/2) di Jakarta

Kanker serviks merupakan kanker kedua yang paling umum terjadi pada perempuan di Indonesia. Namun, 70% perempuan terdiagnosis kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut. Padahal, pengobatan pada stadium ini menjadi kurang efektif. Akibatnya, 50% perem-



puan yang terdiagnosis kanker serviks meninggal dunia karena penyakit tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang

adekuat untuk kanker serviks di Indonesia.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks.

Prioritas pada rencana aksi nasional adalah skrining kanker serviks, dengan target menskrining 75% dari seluruh perem-

puan berusia 30-69 tahun. Skrining ini menggunakan metode pemeriksaan DNA HPV yang memiliki kualitas yang terjangkau.

Salah satu bagian penting pada rencana aksi nasional ini, yakni peralihan metode skrining kanker serviks primer dari metode yang ada saat ini ke skrining DNA

HPV. Pada 2020, skrining kanker serviks melalui metode inspeksi visual asam asetat (IVA) dan pemeriksaan sitologi hanya mencakup 9,3% perempuan dalam populasi target, dengan variasi yang signifikan antarprovinsi.

Metode skrining DNA HPV dilakukan dengan pedoman dan

protokol klinis yang sesuai, termasuk transportasi untuk pengujian tersentralisasi, serta memperkuat kemampuan laboratorium.

Kementerian Kesehatan juga mempertimbangkan strategi skrining alternatif seperti skrining di tempat layanan kesehatan dan metode pengambilan sampel mandiri.

\Untuk mencapai

target skrining dalam upaya mengeliminasi kanker serviks, penting bagi Indonesia untuk menerapkan metode, alat, dan teknologi skrining yang efisien. Untuk mencapai tujuan ini, RAN menyerukan peninjauan kembali bukti-bukti ilmiah internasional dan praktik terbaik. (*)

Ilirium Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma
Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal
Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :
Kontak: 0812-3333-3333

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Pilot Susi Air Hampir Setahun Disandera, Aparat Masih Negosiasi KKB



Pilot Susi Air masih disandera oleh KKB di Papua.

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Polisi buka suara terkait upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Marthens yang telah disandera selama hampir satu tahun oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua,

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno menegaskan proses negosiasi terhadap kelompok Egianus masih terus dilakukan melalui pemerintah setempat.

Ia menjelaskan upaya pembebasan masih terus dilakukan melalui cara-cara persuasif meskipun penyanderaan telah berlangsung selama hampir satu tahun.

"Saat ini yang dikependakan adalah negosiasi dengan KKB melalui Pj. Bupati Nduga. Karena beliau memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan Egianus Kogoya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2).

Bayu menuturkan selama ini pelbagai

upaya komunikasi terus dibangun oleh Pj. Bupati Nduga Edison Gwijangge. Hanya saja, kata dia, masih belum ada titik temu ataupun kesepakatan dengan pihak KKB.

Di sisi lain, Bayu mengatakan upaya negosiasi tersebut masih menjadi prioritas. Ia menyebut belum ada rencana untuk mengambil pendekatan bersenjata lantaran mempertimbangkan faktor kemanusiaan serta keselamatan dari Philip itu sendiri.

"Kami dari Satgas Damai Cartenz 2024 mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu karena pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot itu sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani memastikan Philip masih hidup dan dalam kondisi yang sehat. Ia juga menduga Philip masih belum dibawa pergi dari lokasi terakhir di Nduga, Papua Pegunungan.

"Iya (masih hidup). Lokasi masih di sekitar Kabupaten Ndu-

ga," ujarnya Faizal lewat pesan singkat, Senin (15/1).

"Kita berharap agar Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Marthens yang disandera oleh KKB bisa dibebaskan. Sehingga bisa kembali ke Negeranya dalam keadaan sehat terutama kepada keluarganya," tuturnya.

Philip disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pada 26 Mei lalu, KKB merilis video yang menunjukkan kondisi Philip. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan.

Pada September lalu, aparat mengklaim Philip masih hidup. Juru Bicara TPNPB-OPM Seby Sambom juga menyatakan Philip dalam kondisi baik.

"Pilot itu kan tinggal dengan orang, manusia, masih hidup," kata Seby beberapa waktu lalu. (*)

Denny Indrayana dan Almas Putra Boyamin Saling Gugat ke Pengadilan

Laporan: Hamid

JAKARTA-Pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan putra Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Almas Tsaqibbiru Re A, terlibat saling gugat imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Almas selaku pemohon perkara uji materi nomor: 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi (MK) menggugat Denny ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru.

Perkara yang didaftarkan pada Senin, 29 Januari 2024 itu terdaftar dengan nomor: 4/Pdt.G/2024 PN Bjb. Sidang pertama akan digelar pada Selasa, 6 Februari 2024 pukul 09.00 WITA.

"Hari ini saya mendapatkan salinan gugatannya dan panggilan untuk bersidang di PN Banjarbaru pada Selasa, 6 Februari 2024. Atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, tentu akan saya hadapi, dan



Denny Indrayana dan Almas Tsaqibbiru terlibat saling gugat imbas putusan MK.

melakukan gugatan keberatan dengan penilaian Denny yang menyebut ayahnya mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming Raka.

Almas mengaku dirugikan atas penilaian Denny tersebut dan meminta ganti rugi senilai Rp500 miliar.

"Tergugat [Denny Indrayana] tidak pernah mampu membuktikan, menyertakan dengan data, fakta, ataupun bukti atas pernyataan tergugat," kata Almas dalam gugatannya. Terdapat delapan poin tuntutan dalam gugatan Almas tersebut. Satu di antaranya ialah meminta hakim PN Banjarbaru menghukum Denny

untuk membayar kerugian immateriel setara dengan Rp500 miliar.

Merespons upaya hukum tersebut, Denny menyatakan bakal melayangkan gugatan balik. Menurut dia, substansi permohonan Almas aneh dan lucu. Di sisi lain, hal tersebut dinilai sebagai modus pembungkaman atas kebebasan berpendapat.

"Saya akan menghadapi gugatan tersebut dengan perlawanan terbalik dan gugatan balik sebagai upaya menegakkan lagi etika dan negara hukum yang telah diabrak-abrik oleh permohonan dan putusan 90 Mahkamah Keluarga Jokowi," ucap Denny. (*)

KPK Panggil Sekjen Kemenkes Terkait Korupsi Pengadaan APD

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi untuk diperiksa sebagai saksi hari ini.

Tim penyidik KPK memerlukan keterangan Oscar untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri

(APD) Covid-19 di Kemenkes tahun anggaran 2020-2022 yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

Selain Oscar, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisararis Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik

menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Oscar Primadi dan Siti Fatimah Az Zahra," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (2/2).

Belum diketahui materi yang hendak didalami tim penyidik KPK lewat pemeriksaan terhadap kedua orang saksi tersebut. Hal ini biasanya disampaikan



KPK setelah pemeriksaan rampung.

Kemarin, Kamis (1/2), tim penyidik KPK telah memeriksa karyawan BUMN Jodi Imam Prasajo. Jodi yang juga merupakan anak dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ini didalami perihal aktivitas keuangan dengan salah satu tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

"Saksi [Jodi Imam Prasajo] hadir dan

dikonfirmasi antara lain kaitan dengan dugaan adanya aktivitas keuangan antara saksi dengan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Ali.

"Di samping itu didalami juga adanya kedekatan antara salah satu tersangka dalam perkara ini dengan mantan pejabat tinggi di Kemenkes agar mendapatkan rekomendasi untuk ikut dalam pengadaan

APD dimaksud," sambungnya.

Dalam proses penyelidikan berjalan, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Semua itu akan diinformasikan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka. (*)

gan di Kantor LKPP dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak termasuk dugaan transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menjelaskan nilai anggaran proyek mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD. Sudah ada tersangka yang ditetapkan namun belum disampaikan KPK kepada publik.

Semua itu akan diinformasikan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka. (*)

Display Tenun Bone-Bone Didominasi Milenial



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP- Penutupan Display Tenun Bone-Bone 2024 sudah berakhir Minggu malam (28/1/2024). Dalam catatan penyelenggara, pengunjung Lippo Plaza Baubau yang ingin menyaksikan Display Tenun Bone-Bone selama 3 (tiga) hari pelaksanaan ramai didominasi kaum milenial yang tertarik dengan proses menenun.

Lurah Bone-Bone Ramadan melalui telepon selularnya Senin (29/1/2024) mengungkapkan, kaum milenial yang datang ke Lippo Plaza selain menyaksikan proses penenunan juga ada interaksi dengan para penenun Bone-Bone, bertanya tentang nama alat-alat yang digu-

nakan, berapa lama proses menenun, apa saja tahapan-tahapan menenun.

Disamping itu, diantara mereka ada juga yang mengambil gambar video dan mengupload ke Sosmed. "Setidaknya Display Tenun Bone-Bone 2024 ibarat kita sedang menebar jaring, semakin lebar kita menebar jaring semakin besar peluang kita mendapatkan ikan, semakin luas tenun Bone-Bone dikenal khalayak ramai, semakin besar juga peluang pasar yang terbuka untuk memasarkan produknya, melalui diskusi dan workshop tentang digital marketing dengan memanfaatkan media sosial, ujarnya.

Ramadhan berharap produk tenun Bone-Bone dapat meram-

bah pasar lebih luas. Terlebih adanya dukungan penuh dan komitmen Ketua Dekranasda Kota Baubau, Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman untuk merangkul dan membela tenun Bone-Bone untuk hadir dalam produk turunan seperti jaket, tas, dompet dan asesoris fashion lainnya.

Pemerintah Kelurahan Bone-Bone untkap Ramadan akan terus berupaya agar tenun Bone-Bone bisa terkenal sampai ke nasional maupun mancanegara. Untuk itu, pihaknya telah memasukkan usulan pengembangan produk tenun Bone-Bone ke usulan pra Musrenbang tingkat kelurahan, guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenun Bone-Bone. (*)

Serap Aspirasi Masyarakat, Pj Wali Kota Baubau Libatkan Asisten



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyerap aspirasi masyarakat di kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan para Asisten Setda Kota Baubau. Pelibatan para Asisten dalam penyerapan aspirasi masyarakat menurut Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dikarenakan tugas asisten itu melakukan koordinasi kepada OPD yang dikoordinasikannya. Misalnya, Asisten dua mengoordinasikan 11 OPD, bagaimana per-

encanaan selama ini dan dieksekusi seperti apa, sehingga harus bisa memahami bentuk monitoring dan pengendaliannya itu dalam bentuk interaksi langsung. Hal ini dilakukan adalah memastikan apa yang diceritakan itu memang itu yang menjadi kebutuhan.

Dikatakan, yang namanya perencanaan itu selalu ada narasi normatif dan ada spesifik dan yang namanya spesifik itu, itu tergantung siapa yang menyampaikan pada saat pengambilan keputusan dan itu yang selalu terjadi.

Pada saat diputuskan mana yang prioritas, apabila yang dihadiri itu fokus pada prioritas yang diinginkan maka itu yang akan disampaikan, dan biasanya ada kebutuhan di kelurahan sudah 5 bahkan 10 tahun diminta tetapi tidak pernah terpenuhi, bukan soal terpenuhinya kapan akan tetapi kenapa tidak terpenuhi itu yang ingin dilakukan. Apabila sudah 5 tahun disampaikan dan itu harusnya pada tahun kedua atau tahun ketiga sudah terpenuhi sehingga akan dilakukan monitoring pengendalian.

Kepala OPD Baubau Tanda Tangan Perjanjian Kinerja, Lima OPD Sudah Memiliki SAKIP Level Tinggi



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP- Sebagaimana amanah KemPAN dan RB tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemkot Baubau telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja yang diikuti oleh seluruh kepala OPD pada Kamis (1/2/2024) di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata. Penandatanganan perjanjian kinerja adalah proses pembangunan sesungguhnya dan bagian didalam proses awal dari setiap siklus pembangunan. Penandatanganan kinerja ini adalah kontrak untuk penyelenggaraan di setiap OPD.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengatakan, penandatanganan kinerja dan pakta integritas bukan hanya mengenai administrasi tanatangan kemudian selesai akan tetapi ini adalah bagian dari manajerial dan amanah untuk menjalankan tupoksi ada di kepala OPD.

"Jadi saya hanya bertugas untuk melakukan monitoring, kontrol dan evaluasi setelah penandatanganan ini. Dan yang namanya perjanjian kinerja sekali lagi kinerja itu bukan hanya menyelesaikan kegiatan sesuai serapannya, akan tetapi kinerja itu juga diukur terkait selesainya itu tidak ada masalah keuangan. Dokumen yang bapak ibu pegang itu adalah daftar program atau kegiatan beserta anggarannya yang sudah ditetapkan dan telah kita sepakati dengan

DPRD," ujarnya.

Ditambahkan, pada akhir tahun 2023, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada 5 OPD yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang memiliki SAKIP tertinggi dengan predikat B. Kelima OPD ini penyelenggaraan sisi akuntabilitas kerjanya itu sudah berpredikat B artinya dia sudah ada level yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Sedangkan yang mendapat predikat CC terendah itu ada 5 OPD juga yang pertama adalah Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup,

Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kelima OPD ini memiliki predikat paling rendah, sehingga harus menjadi perhatian.

Sementara itu, tema pembangunan Kota Baubau sudah ditetapkan yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing Dimana 3 kata kunci yakni bicara tentang peningkatan berarti ada langkah yang maju dan meningkat. Kemudian tata kelola pemerintahan, tata kelola itu lebih kepada manajerial mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan berdaya saing. Daya saing itu berarti kemampuan untuk bersaing, persaingannya adalah kemampuan manajerial memimpin OPD semua sejajar, dan ini tolak ukur keberhasilan kepala OPD dalam memimpin.

Karena proses manajemen itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan kontroling, fungsi kontroling itu jarang kita lakukan dilevel pimpinan. Tugas kita selaku pimpinan OPD, pimpinan wilayah memastikan perencanaan dan kontroling itu sesuai dan

ini yang kita lakukan. Dan pertemuan kita ini adalah ingin mendingarkan dari para lurah dan aparatnya kecamatan maupun kelurahan menyampaikan dan silahkan disampaikan. Dan saya tegaskan yang disampaikan bukan keinginan akan tetapi kebutuhan karena keinginan dan kebutuhan itu tidak

sama," katanya.

Dr Muh Rasman juga menyampaikan kepada seluruh ASN di kecamatan dan kelurahan apabila ada yang ingin disampaikan kepada kepala daerah karena terbatas dengan waktu maka pihaknya mem-persilahkan untuk disampaikan langsung kepada lewat media sosial milik

Dr Muh Rasman menegaskan kembali bahwa semua memiliki tanggung-jawab haknya sudah diberikan dan kewajibannya segera dilaksanakan dan jangan sampai tugas kepala OPD dikerjakan oleh orang lain. Sehingga, harus fokus pada tugas sebagai eksekutif, jangan sampai ada perasaan ini bukan bagian dari Pemerintah Kota Baubau.

"Ini saya sampaikan karena sudah ada beberapa bukti digital yang menyatakan bahwa harusnya Pemerintah Kota Baubau tidak boleh seperti ini padahal dia adalah kepala OPD. Saya ingin statemen seperti itu tidak keluar lagi, karena itu bentuk penghinaan bahkan cuci tangan dan itu level kepemimpinan paling rendah. Sehingga saya meminta untuk kita semua statemen seperti itu jangan dikeluarkan lagi karena setelah kita menandatangani ini maka kewajiban menjalankan pembangunan disektornya ada di kepala OPD dan juga statemen seperti itu menjadi tolak ukur bahwa kita memiliki kemampuan atau tidak. (*)

Pemkot Baubau atau lewat link tree wali kota yakni Facebook, Twitter dan Instagram. jangan takut untuk menyampaikan lewat medsos asalkan tidak menggunakan akun palsu. Dan yang penting informasinya benar bukan hoax karena kalau hoax itu namanya fitnah. (*)